JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.2, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Dampak Perang Sunggal terhadap pembentukan identitas sosial dan budaya Masyarakat Sunggal Tahun 1872-1895

Baharudin Rauf, Hotmatua Paralihan, Nabila Yasmin
Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: rbaharudin14@gmail.com

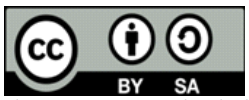
Abstrak

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak Perang Sunggal (1872–1895) dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat Sunggal. Kajian ini menelusuri transformasi struktur sosial, pergeseran nilai budaya, dan ekspresi resistensi terhadap kolonialisme Belanda dan elit lokal yang pro-kolonial. Penelitian ini membahas karakteristik perlawanan masyarakat adat Sunggal terhadap konsesi tanah oleh Kesultanan Deli kepada perusahaan tembakau Belanda serta bentuk-bentuk resistensi simbolik dan identitas kolektif yang muncul pascaperang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembentukan identitas sosial dan budaya masyarakat Sunggal sebagai dampak dari konflik kolonial. Metode yang digunakan adalah metode sejarah kualitatif dengan pendekatan interdisipliner. Teknik pengumpulan data terdiri dari empat macam, yaitu studi pustaka, dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Teknik wawancara dilakukan melalui wawancara semi-struktural dengan tokoh adat dan sejarawan lokal, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menganalisis arsip kolonial dan foto-foto sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perang Sunggal (1872–1895) merupakan peristiwa penting yang menandai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda sekaligus menjadi tonggak pembentukan identitas sosial dan budaya masyarakat Sunggal. Perang ini muncul sebagai reaksi atas politik konsesi dan perampasan tanah adat oleh kolonial yang didukung elite komprador Kesultanan Deli. Dipimpin Badiuzzaman Surbakti, perlawanan tidak hanya bersifat teritorial, tetapi juga mempertahankan martabat, nilai-nilai, dan struktur sosial adat. Dampaknya bersifat multidimensional: secara politik mengakhiri otonomi lokal; secara sosial menyebabkan dislokasi dan perubahan struktur kekerabatan; secara ekonomi memunculkan proletarisasi; dan secara budaya memicu transformasi adat serta revitalisasi simbol identitas lokal. Identitas sosial masyarakat pascaperang dibentuk melalui dialektika antara dominasi kolonial dan memori kolektif.Penelitian ini sesuai dengan teori identitas budaya (Stuart Hall), resistensi simbolik (James C. Scott), identitas sosial (Henri Tajfel), serta teori konflik sosial (Karl Marx dan Lewis Coser) sebagai landasan teoritik dan sekaligus sebagai pisau kritik terhadap narasi hegemonik kolonial.
Kata kunci: Perang Sunggal, identitas sosial, resistensi simbolik, kolonialisme, Kesultanan Deli.

Abstract

This study examines the impact of the Sunggal War (1872–1895) on the formation of the social and cultural identity of the Sunggal community. The focus lies on the transformation of social structures, shifts in cultural values, and expressions of resistance against Dutch colonialism and local pro-colonial elites. The research explores the characteristics of indigenous resistance in Sunggal against land concessions granted by the Deli Sultanate to Dutch tobacco companies, as well as symbolic resistance and the emergence of collective identity in the post-war period. The objective of this research is to analyze the historical process through which the social and cultural identity of the Sunggal community was shaped as a result of colonial conflict. This study employs a qualitative historical method with an interdisciplinary approach. Data collection techniques include literature review, documentation, in-depth interviews, and field observation. Semi-structured interviews were conducted with local traditional leaders and historians, while documentation involved the analysis of colonial archives and historical photographs. The findings reveal that the Sunggal War (1872–1895) was a pivotal event that marked both an act of resistance against Dutch colonialism and a turning point in the formation of Sunggal's social and cultural identity. Led by Badiuzzaman Surbakti, the resistance was not only territorial but also aimed at preserving dignity, values, and the traditional social order. The war's impacts were multidimensional: politically, it ended local autonomy; socially, it triggered dislocation and changes in kinship structures; economically, it led to proletarianization; and culturally, it prompted transformations in customary traditions and a revitalization of local identity symbols. Post-war social identity was shaped through a dialectic between colonial domination and collective memory. This study is grounded in the theories of cultural identity (Stuart Hall), symbolic resistance (James C. Scott), social identity (Henri Tajfel), and social conflict theory (Karl Marx and Lewis Coser), which serve both as analytical frameworks and critical tools to challenge colonial hegemonic narratives.
***Keywords**: Sunggal War, social identity, symbolic resistance, colonialism, Deli Sultanate.*

Article Info
Received date: 30 January 2026 Revised date: 17 February 2026 Accepted date: 19 February 2026



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang tak terpisahkan dari perjalanan sejarah umat manusia. Dalam banyak kasus, konflik muncul akibat perebutan kekuasaan dan sumber daya, termasuk tanah, yang menjadi faktor krusial dalam hubungan sosial dan politik antar kelompok. Di Indonesia, sejarah mencatat berbagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap penjajahan kolonial Belanda yang tidak hanya berdampak pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk dinamika sosial dan budaya masyarakat lokal. terutama dalam hal penguasaan tanah dan eksploitasi ekonomi. Sejarah kolonialisme di Indonesia bukan hanya mencerminkan dominasi kekuasaan asing atas wilayah jajahan, tetapi juga menunjukkan dinamika kompleks antara kekuatan kolonial, elite lokal, dan masyarakat adat. Di Indonesia, sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda mencatat berbagai bentuk perjuangan rakyat, mulai dari Perang Diponegoro di Jawa, Perang Aceh, hingga perlawanan lokal yang terjadi di Sumatera Timur(Hadi, 2012).

Salah satu contoh paling menonjol dari interaksi ini dapat dilihat dari sejarah wilayah Deli, khususnya kawasan Medan dan Sunggal, pada paruh kedua abad ke-19. Medan yang awalnya hanyalah sebuah kampung bernama Medan Putri, berkembang pesat menjadi pusat perkebunan dan perdagangan setelah kedatangan para pengusaha Belanda yang tertarik pada potensi lahan suburnya untuk ditanami tembakau Deli komoditas unggulan yang sangat diminati pasar Eropa(Ummah, 2019).

Pola kolonialisme ekonomi di Deli bermula ketika *Jacobus Nienhuys*, seorang pengusaha tembakau asal Belanda, bersama mitra-mitranya seperti *Van der Arends* dan *Deli Maatschappij*, memperoleh konsesi lahan dari Sultan Deli. Pemberian hak erfpacht selama 99 tahun ini dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan para pemimpin adat urung (kerajaan lokal) seperti Urung Sunggal. Padahal, dalam struktur pemerintahan tradisional Kerajaan Deli, datuk-datuk urung memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengelolaan tanah komunal. Pelanggaran terhadap norma adat ini bukan hanya menimbulkan ketegangan sosial, tetapi juga menjadi titik awal terjadinya konflik terbuka.Konflik ini bermula dari kebijakan sepihak Sultan Deli yang memberikan konsesi tanah ulayat masyarakat Sunggal kepada perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau asing tanpa musyawarah dengan pemimpin adat setempat. Tindakan ini tidak hanya melanggar struktur sosial yang telah mapan dalam sistem kerajaan urung (adat), tetapi juga menciptakan ketegangan antara elite Melayu pro-kolonial dengan masyarakat adat Karo-Sunggal yang merasa identitas dan hak atas tanah mereka terancam(Sembiring, 2018).

Di bawah kepemimpinan Datuk Badiuzzaman Surbakti, masyarakat Sunggal melakukan perlawanan yang berlangsung selama lebih dari dua dekade. Perang ini bukan semata konflik bersenjata, tetapi mencerminkan upaya kolektif dalam mempertahankan kedaulatan budaya dan sosial masyarakat lokal dari dominasi kolonialisme dan elite lokal komprador(Sinar, 1970).

Meskipun banyak penelitian terdahulu menyoroti aspek politik dan militer dari Perang Sunggal, masih sedikit kajian yang secara mendalam membahas dampak sosial-budaya yang ditimbulkan. Padahal, perang ini telah menyebabkan disintegrasi struktur sosial adat, perubahan peran kepemimpinan tradisional, munculnya solidaritas lintas etnis (Karo-Melayu), serta membentuk narasi identitas kolektif masyarakat Sunggal yang terus diwariskan hingga hari ini(Munthe, 2012).

Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Sunggal, yang saat itu merupakan salah satu urung dari empat urung utama di Kerajaan Deli, dan dipimpin oleh Datuk Badiuzzaman Surbakti. Konsesi sepihak atas tanah ulayat di Sunggal untuk kepentingan perusahaan perkebunan asing menimbulkan kemarahan masyarakat adat. Reaksi terhadap situasi ini tidak hanya berupa penolakan simbolik, tetapi berkembang menjadi gerakan perlawanan bersenjata yang berlangsung selama lebih dari dua dekade (1872–1895). Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai "Perang Sunggal".konflik agraria yang menandai awal mula sengketa tanah antara rakyat dan perusahaan perkebunan asing di Sumatera Timur(Sinar, 1970).

Perang ini memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar perebutan tanah. Ia menjadi simbol

perlawanan terhadap sistem kolonial yang mengabaikan kearifan lokal, merusak struktur sosial adat, dan menyingkirkan masyarakat dari tanah leluhur mereka. Lebih jauh, Perang Sunggal juga memunculkan proses pembentukan identitas kolektif baru masyarakat Sunggal. Dalam kondisi represi dan dominasi kolonial, masyarakat membangun resistensi simbolik melalui pelestarian bahasa, marga, adat istiadat, dan narasi kepahlawanan. Dengan kata lain, perang ini turut mengonstruksi identitas sosial dan budaya masyarakat Sunggal sebagai bentuk respon terhadap krisis kultural yang ditimbulkan oleh kolonialisme.

Namun, hingga kini, banyak kajian sejarah tentang Perang Sunggal masih berfokus pada aspek militer dan elite politik, sementara dimensi sosiokultural yang berkaitan dengan dampak terhadap struktur sosial dan pembentukan identitas lokal belum tergali secara mendalam. Padahal, konflik ini memiliki makna simbolik yang signifikan dalam sejarah perlawanan masyarakat lokal terhadap kolonialisme. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji Perang Sunggal dalam perspektif sosial dan budaya guna memahami bagaimana pengalaman sejarah kolektif tersebut membentuk karakter masyarakat Sunggal hingga saat ini.

Meskipun demikian, studi-studi sebelumnya tentang Perang Sunggal masih cenderung berfokus pada aspek militer dan politik, sementara dimensi sosial dan budaya belum banyak diteliti secara mendalam. Padahal, dampak konflik ini sangat signifikan dalam membentuk identitas kolektif masyarakat lokal, baik dalam struktur sosial, praktik budaya, maupun memori historis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana Perang Sunggal memengaruhi pembentukan identitas sosial dan budaya masyarakat Sunggal dalam kurun waktu 1872–1895.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif-historis. Metode sejarah diterapkan melalui empat tahapan utama: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik

Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi arsip kolonial Belanda yang telah ditransliterasikan, laporan militer, dokumen Residen Deli, serta dokumen terkait konsesi tanah. Sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan Perang Sunggal dan dinamika sosial Sumatera Timur.

Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan dalam dua tahap yaitu:

a. Kritik eksternal untuk menguji keaslian dokumen.
b. Kritik internal untuk menilai kredibilitas dan konsistensi isi sumber.

Tahap ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas historis.

Interpretasi dan Analisis

Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis konten. Proses analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tematik (konsesi tanah, perubahan struktur adat, solidaritas etnis, resistensi simbolik), serta sintesis dengan teori-teori yang digunakan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber untuk menjaga konsistensi dan kredibilitas temuan.

Historiografi

Tahap akhir adalah penulisan sejarah secara deskriptif-analitis dan kronologis. Penulisan tidak hanya merekonstruksi peristiwa, tetapi juga menjelaskan makna sosial dan kultural Perang Sunggal dalam pembentukan identitas masyarakat Sunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Terjadinya Perang Sunggal (1872–1895)

1.Transisi kekuasaan antara Kerajaan Sunggal dan Kesultanan Deli

Kerajaan Sunggal Serbanyaman berakar dari sejarah panjang migrasi dan genealogis keluarga besar Puak Sunggal. Asal-usul kerajaan ini ditelusuri dari sosok Jolol Karo-Karo Surbakti dan keturunannya, terutama Sirsir (atau Serser) Surbakti dan Kebal Surbakti, yang berasal dari wilayah Pakpak (Dairi). Kedua tokoh ini melakukan mobilitas ke wilayah Tanah Karo dan Gayo Alas, membek permukiman di Lingga dan Torong, yang kelak menjadi embrio kawasan Sunggal.Salah satu keturunan penting, Sirsir Surbakti, menikahi seorang perempuan yang diyakini sebagai penjelmaan gajah, dan melahirkan Gadjah Surbakti(Munthe, 2012). Gadjah kemudian mendirikan Kampung Gadjah di wilayah Sitelu Kuru, yang memperkuat keterikatan genealogis dan politis antara berbagai komunitas seperti Penghulu Gadjah, Penghulu Lingga, dan marga Surbakti.Penerusnya, Adir Surbakti, mendirikan

kampung baru di Sembuaikan, di kaki Gunung Sibayak, dan menyebutnya "Songgal"(Sembiring, 2018). Di bawah pengaruh Datuk Kota Bangun, Adir memeluk agama Islam pada tahun 1632. Ia memiliki sepuluh anak dan menjadi pendiri Kerajaan Sunggal, yang kekuasaannya meluas hingga bekas wilayah Kerajaan Aru II di Deli Tua. Melalui pernikahan politik antara putrinya, Nang Baluan, dan Gotjah Pahlawan dari Kesultanan Aceh, terbentuklah jaringan kekuasaan regional yang dikenal sebagai Konfederasi Deli, di mana Sunggal diposisikan sebagai Ulon Janji dan Deli sebagai Anak Beru(Sinar, 1970).

Kekuasaan Kerajaan Sunggal terus berlangsung secara turun-temurun, mengalami ekspansi wilayah dan konsolidasi kekuasaan, terutama di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Bubud Surbakti, Andan/Undan Surbakti, dan Datuk Amar Laut Surbakti. Mereka memindahkan pusat pemerintahan dari Kinangkung ke Tanjung Selamat dan kemudian ke Jejabi, serta memperkuat posisi Sunggal sebagai entitas merdeka dengan lambang dan bendera sendiri. Penolakan terhadap dominasi Aceh dan Deli ditegaskan melalui deklarasi kemerdekaan secara de facto(Surbakti, 2011).

Struktur kekuasaan Sunggal yang terus diwariskan secara patrilineal mencapai fase penting ketika Andan atau Undan Surbakti menggantikan Bubud Surbakti dan memindahkan pusat pemerintahan ke Tanjung Selamat. Ia memiliki sejumlah keturunan laki-laki yang kelak memegang peranan penting dalam dinamika internal kerajaan. Putranya, Datuk Amar Laut Surbakti, kemudian mengambil alih kekuasaan pada 1821 dan memindahkan pusat pemerintahan ke Jejabi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mempertegas status kemerdekaan Sunggal, antara lain dengan memperkenalkan lambang bendera berwarna merah dan kuning yang bergambar gajah(Surbakti, 2011).

Penerus berikutnya, Datuk Abdullah Ahmad Surbakti, memindahkan pusat kekuasaan ke wilayah yang kini dikenal sebagai Jalan PAM Tirtanadi, Medan Sunggal. Diberi gelar Datuk Indera Pahlawan, ia merupakan figur penting dalam proses rekonsiliasi politik dengan Kesultanan Deli dan Kesultanan Aceh melalui reaktivasi peran Sunggal sebagai Ulon Janji. Salah satu keturunan beliau, Badiuzzaman Surbakti, kelak akan memainkan peran utama dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda(Surbakti, 2011).

Setelah wafatnya Datuk Abdullah Ahmad Surbakti pada tahun 1857, kepemimpinan sementara dijalankan oleh adiknya, Datuk Muhammad Kecil Surbakti Mengingat usia Badiuzzaman Surbakti yang masih sangat muda saat ayahnya wafat.Kekuasaan ini berlangsung hingga tahun 1866, ketika Badiuzzaman Surbakti, yang saat itu telah cukup dewasa, diangkat sebagai penguasa Sunggal dengan gelar Sri Diraja Indera Pahlawan. Ia memainkan peranan utama dalam mobilisasi perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, khususnya dalam merespons pengambilalihan tanah ulayat oleh pemerintah kolonial. Gerakan yang dipimpin oleh Badiuzzaman dan tokoh adat lainnya merupakan bentuk perlawanan dari bawah (grassroots movement), bukan sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai ekspresi pertahanan terhadap tanah, martabat, dan sistem sosial tradisional yang terancam oleh kekuatan kolonial dan elite lokal yang berkompromi dengan pihak asing (Sembiring, 2018).

Kondisi politik yang tidak stabil di wilayah Deli dan Sunggal menjadi pemicu utama lahirnya resistensi terhadap Belanda. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Narasi Perang Sunggal yang diperoleh dariWawancara mendalam dengan Ketua Umum Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid memberikan perspektif baru mengenai Perang Sunggal yang selama ini didominasi oleh narasi dari sudut pandang kolonial atau dari pihak Sunggal sendiri. Menurut beliau, konflik antara Kesultanan Deli dan Kedatukan Sunggal tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik internal, pergantian kekuasaan, dan intervensi kolonial Belanda yang memperparah ketegangan antar-elite lokal.

Dalam penuturannya, narasi sejarah menyebutkan bahwa konflik antara Deli dan Sunggal telah terjadi sebelum meletusnya Perang Sunggal secara terbuka. Perselisihan terkait batas-batas wilayah kekuasaan menjadi salah satu pemicu awal, ditambah adanya dugaan bahwa Kedatukan Sunggal pernah menjalin kerja sama dengan kelompok dari suku Batak untuk menghadapi dominasi Kesultanan Deli.

Situasi menjadi semakin kompleks ketika terjadi kekosongan kepemimpinan baik di Deli maupun di Sunggal. Sultan Mahmud Al-Rasyid wafatdalamusiamuda, dan kekuasaandipegang oleh kerabatkerajaansecarasementara. Tokoh-tokohseperti Raja Muda Sulaiman, Ismail Belonglaut, dan Jafar menjalankanperansebagaiPelaksanaTugas (PLT) Sultan. Di pihaklain, KedatukanSunggal juga kehilanganpemimpinnya dan digantikan oleh seoranganak yang masihkecil. Untuksementarawaktu, urusankenegaraandijalankan oleh pamannya, yang dikenaldengansebutan Datuk Kecil.

Ketika Raja Muda Sulaiman memberikan hak konsesi kepada perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk wilayah Sunggal, masyarakat setempat merasa dirugikan. Politik kolonial Belanda

memanfaatkan ketidakstabilan ini dengan strategi adu domba antar elite lokal dan memperluas pengaruhnya melalui kooptasi lahan adat.

Penolakan terhadap konsesi tanah ini menjadi titik tolak perlawanan rakyat Sunggal. Datuk Kecil menjadi figur sentral dalam memobilisasi perlawanan, dengan menghimpun sekitar 1.500 orang yang siap bertempur. Perang Sunggal pun bukan pertempuran terbuka seperti dalam peperangan formal, tetapi lebih merupakan bentuk perlawanan gerilya: menyerang pabrik, membakar alat produksi kolonial, dan melumpuhkan jalur distribusi.

Perang ini berlangsung hampir 23 tahun (1872–1895) dan sulit dihentikan oleh militer kolonial. Belanda akhirnya menggunakan pendekatan politik tipu daya, yakni mengajak elite perlawanan untuk berdamai, lalu menangkap dan mengasingkan mereka ke Jawa.

Setelah berakhirnya konflik tersebut, barulah Sultan Ma'moen Al-Rasyid naik tahta dan membawa Kesultanan Deli ke masa kemakmuran. Namun, menurut narasumber, terjadi kekeliruan sejarah dalam mengasosiasikan Sultan Ma'moen sebagai tokoh utama dalam Perang Sunggal, karena beliau tidak terlibat secara langsung maupun struktural dalam peristiwa tersebut.

Dengan demikian, narasi dari pihak Kesultanan Deli menggarisbawahi bahwa Perang Sunggal bukan hanya perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga mencerminkan krisis kepemimpinan lokal dan konsekuensi dari intervensi Belanda yang memecah belah elite-elite tradisional di Sumatera Timur.

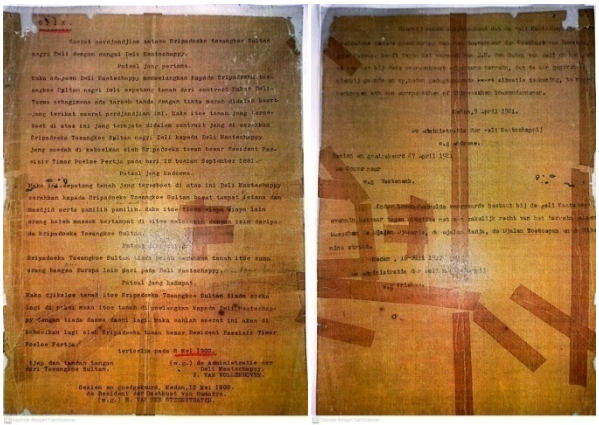
Narasi ini menguatkan pemahaman bahwa konflik lokal seperti Perang Sunggal tidak bisa dipahami secara simplistis sebagai perjuangan antara penjajah dan yang dijajah. Terdapat lapisan kompleks berupa krisis legitimasi kekuasaan, perebutan otoritas antara elite adat, serta manipulasi kolonial yang memanfaatkan kondisi transisi politik. Perspektif dari Kesultanan Deli ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori konflik sosial dan resistensi simbolik (James C. Scott), di mana perlawanan muncul bukan hanya karena represi eksternal, tetapi juga akibat ketidakpuasan terhadap redistribusi kekuasaan dan tanah.

Kesultanan Deli memberikan konsesi tanah kepada perusahaan-perusahaan Eropa, khususnya untuk perkebunan tembakau. Proses konsesi ini terjadi dalam konteks pemerintahan transisional setelah wafatnya Sultan Mahmud Al-Rasyid dan diangkatnya Sultan Ma'moen yang masih muda dan belum dapat menjalankan pemerintahan secara penuh. Kekosongan kepemimpinan ini mendorong munculnya figur-figur pelaksana tugas seperti Raja Muda Sulaiman, Jafar, dan Ismail Belonglaut(Syauqii et al., 2022).

Raja Muda Sulaiman merupakan sosok yang paling aktif dalam menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan pihak Belanda. Pada tahun 1870, ia memberikan hak konsesi atas lahan-lahan di daerah Sunggal, yang kemudian menjadi pusat dari kegiatan perkebunan tembakau Deli. Namun demikian, pemberian konsesi tersebut menimbulkan ketegangan karena tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, khususnya komunitas Karo yang secara tradisional telah mendiami wilayah pedalaman Deli termasuk Sunggal. Ini memperlihatkan bahwa penguasaan atas tanah-tanah adat tidak semata-mata merupakan tindakan sepihak kolonial, melainkan juga berhubungan erat dengan politik internal elite Melayu Deli yang sedang berada dalam situasi kekuasaan yang lemah dan rentan terhadap intervensi asing(Pujiriyani & Puri, 2013).

2. PolitikKonsesi dan Perampasan Tanah oleh Perusahaan Belanda

Salah satu faktor kunci yang mendorong terjadinya Perang Sunggal adalah politik konsesi tanah yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda bekerja sama dengan elite Kesultanan Deli. Sejak pertengahan abad ke-19, pantai timur Sumatera mulai menarik perhatian perusahaan-perusahaan Eropa, khususnya yang bergerak dalam sektor perkebunan tembakau. Kualitas tanah yang subur serta iklim yang cocok menjadikan wilayah ini sasaran utama ekspansi ekonomi kolonial. Proses ini memperoleh legitimasi formal melalui pemberian hak konsesi oleh para penguasa lokal, terutama Sultan Deli, kepada perusahaan-perusahaan asing.



Gambar 4.1 dan 4.2 : Surat Perjanjian Tanah Konsesi antara Kesultanan Deli dengan Deli Maatschappy.
Sumber : Yayasan Sultan Ma'mun Arrasyid.

Namun, konsesi yang diberikan tidak memperhitungkan eksistensi dan hak ulayat masyarakat adat, khususnya suku Karo yang mendiami wilayah pedalaman Deli, termasuk kawasan Sunggal. Dalam pandangan masyarakat adat, tanah bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian integral dari sistem sosial dan budaya yang mengatur hubungan antaranggota komunitas. Oleh karena itu, ketika tanah adat diubah menjadi lahan perkebunan kolonial tanpa persetujuan mereka, timbul resistensi yang tidak hanya berdimensi politik tetapi juga simbolik dan eksistensial.

Praktik perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan seperti Deli Maatschappij dan perusahaan tembakau lainnya berlangsung dengan cara yang sistematis. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya memperoleh tanah melalui konsesi formal dari Sultan, tetapi juga melalui tekanan militer dan manipulasi politik. Sering kali, masyarakat lokal dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka melalui cara-cara yang tidak adil, seperti pembatasan aktivitas pertanian, kriminalisasi atas bentuk-bentuk penolakan, hingga pengusiran paksa(Sinar, 1970).



Gambar 4.3 :Peta letak Tanah konsesi yang diberikan oleh Kesultanan Deli kepada Deli Maatschappy
Sumber: Arsip Taman Baca Tengku Luckman Sinar

Di sisi lain, pihak Kesultanan Deli cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat adat demi mempertahankan aliansi ekonomi dan politik dengan Belanda. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara elite Melayu yang memperoleh keuntungan dari sistem konsesi, dengan masyarakat Karo yang justru mengalami marginalisasi dan pemiskinan struktural. Kondisi ini semakin memperkuat semangat perlawanan di kalangan masyarakat Sunggal yang merasa terancam keberadaannya, baik secara ekonomi maupun kultural(Sinar, 1970).

Secara struktural, kebijakan konsesi dan ekspansi perkebunan kolonial ini menimbulkan perubahan besar dalam pola pemilikan tanah, distribusi kekuasaan lokal, dan hubungan sosial antar-etnis. Dalam konteks ini, resistensi yang dilakukan oleh Kerajaan Sunggal dipandang sebagai bentuk pertahanan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat yang sedang terancam oleh kekuatan kolonial dan elite lokal yang telah berkolaborasi. Hal ini juga menjelaskan mengapa perlawanan yang muncul

tidak bersifat sporadis, melainkan terorganisir dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk para pemimpin adat, bangsawan lokal, serta kelompok tani(Suprayitno & Hanum Ritonga, 2018).

3. Resistensi Lokal terhadapPenetrasiKolonialisme dan Elite MelayuKomprador

Penetrasi kolonialisme Belanda di wilayah Deli dan Sunggal tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui strategi kooptasi terhadap elite lokal, khususnya elite Kesultanan Deli yang memainkan peran sebagai kompradoryakni perantara lokal yang memfasilitasi kepentingan ekonomi dan politik kekuasaan kolonial. Dalam hal ini, elite Melayu Deli, terutama yang berada dalam lingkar kekuasaan istana, memberikan dukungan terhadap kebijakan konsesi lahan yang secara langsung merugikan komunitas-komunitas adat Karo di wilayah Sunggal(Sinar, 1970).

Keterlibatan elite lokal sebagai perpanjangan tangan kolonial menyebabkan terjadinya polarisasi kekuasaan dan konflik horizontal antara kelompok yang mengakomodasi kolonialisme dan kelompok yang menolaknya. Dalam konteks ini, Kerajaan Sunggal berada dalam posisi oposisi terhadap kedua kekuatan tersebutyakni kolonial Belanda dan elite Melayu yang telah berkompromi. Hal ini mendorong lahirnya bentuk perlawanan yang berorientasi pada pemulihan kedaulatan lokal dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Datuk Sri Diraja Indera Pahlawan Badiuzzaman Surbakti menjadi figur sentral dalam upaya mobilisasi perlawanan tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Sunggal memperkuat posisi politiknya sebagai entitas yang tidak tunduk pada Kesultanan Deli maupun kekuasaan Belanda. Dengan dukungan tokoh-tokoh adat, bangsawan tradisional, dan kelompok petani, Badiuzzaman memimpin gerakan resistensi yang bersifat militan namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Gerakan ini tidak hanya dimotivasi oleh semangat anti-kolonial, tetapi juga oleh kesadaran akan pentingnya mempertahankan sistem sosial dan budaya lokal yang terancam oleh transformasi ekonomi kolonial(Hadi, 2012).

Salah satu bentuk nyata dari resistensi ini adalah pengorganisasian kekuatan lokal dalam skala besar. Sekitar 1.500 pasukan rakyat dikerahkan untuk mempertahankan wilayah Sunggal dari infiltrasi kolonial. Strategi perlawanan yang digunakan bersifat gerilya, memanfaatkan medan geografis dan jaringan solidaritas kekerabatan masyarakat Karo. Selain itu, perlawanan ini juga memperlihatkan dimensi simbolik, seperti penolakan terhadap simbol-simbol kekuasaan kolonial dan konsolidasi identitas lokal melalui bendera, ritual adat, dan narasi kepahlawanan.

Meskipun pada akhirnya perlawanan ini berhasil ditekan oleh kekuatan militer kolonial, terutama melalui serangkaian operasi militer pada dekade 1880-an dan 1890-an, perjuangan masyarakat Sunggal memberikan kontribusi penting dalam sejarah gerakan anti-kolonial di Sumatera Timur. Perlawanan ini memperlihatkan bahwa konflik bukan sekadar persoalan politik kekuasaan, melainkan juga konflik atas identitas, ruang hidup, dan keberlangsungan budaya lokal. Dengan demikian, resistensi terhadap kolonialisme dalam konteks Perang Sunggal dapat dipahami sebagai manifestasi dari kesadaran kolektif masyarakat adat dalam mempertahankan otonomi sosial, politik, dan budaya mereka dari kekuatan hegemonik eksternal dan internal(Sinar, 1970).

Perang Sunggal (1872–1895) tidak hanya merupakan bentuk perlawanan terhadap penetrasi kolonialisme Belanda di wilayah Sumatera Timur, tetapi juga menjadi titik balik dalam transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Konflik ini lahir dari resistensi kolektif terhadap perampasan tanah adat, kooptasi elite lokal oleh kolonial, serta upaya mempertahankan struktur kekuasaan dan sistem nilai tradisional yang mulai terdesak oleh kekuatan eksternal. Oleh karena itu, dampak perang ini perlu dipahami dalam kerangka multidimensional yang meliputi aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Secara politik, kekalahan Kerajaan Sunggal dalam menghadapi ekspansi militer Belanda mengakibatkan hilangnya otonomi politik lokal. Wilayah yang sebelumnya memiliki sistem pemerintahan mandiri berbasis adat, kini berada dalam kendali administratif kolonial. Struktur pemerintahan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan pun digantikan oleh sistem birokrasi kolonial yang ditopang oleh aparat asing, seperti controleur dan residen. Hal ini menandai fase awal dari proses pemusatan kekuasaan kolonial yang mengabaikan eksistensi struktur politik lokal.

Dari sisi sosial, perang yang berlangsung dalam kurun waktu lebih dari dua dekade telah menimbulkan dislokasi komunitas dalam skala besar. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka akibat invasi militer, pembakaran permukiman, dan perampasan lahan secara paksa. Perubahan ini turut menyebabkan keretakan dalam sistem sosial tradisional, termasuk institusi marga, ikatan kekerabatan, dan norma adat yang sebelumnya menjadi basis pengorganisasian

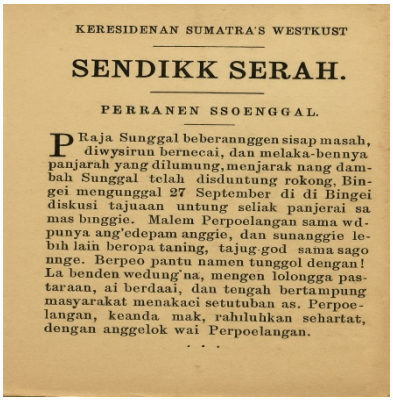
masyarakat. Ketegangan etnis juga muncul sebagai akibat dari posisi ambigu elite Kesultanan Deli, yang dianggap sebagian masyarakat Karo sebagai pihak yang berkolaborasi dengan kekuasaan kolonial dalam proses perampasan tanah dan eksploitasi sumber daya.

Di bidang ekonomi, Perang Sunggal memunculkan perubahan yang sangat signifikan. Wilayah-wilayah pertanian masyarakat adat secara sistematis dikonversi menjadi lahan perkebunan tembakau milik perusahaan-perusahaan Belanda, seperti Deli Maatschappij. Proses ini tidak hanya menghapus sistem pengelolaan tanah berbasis komunal, tetapi juga memaksa masyarakat lokal menjadi tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan kolonial. Akibatnya, terjadi proses proletarisasi paksa, di mana masyarakat kehilangan kontrol atas sumber daya alam mereka sendiri dan mengalami ketergantungan ekonomi pada sistem kapitalisme kolonial yang eksploitatif.

Dari sudut pandang budaya, perang ini membawa dampak yang ambivalen. Di satu sisi, perlawanan terhadap kolonialisme dan elite komprador memperkuat semangat kolektivitas dan identitas kultural masyarakat Karo di wilayah Sunggal. Tokoh-tokoh perlawanan seperti Badiuzzaman Surbakti menjadi simbol resistensi dan warisan perjuangan yang kemudian diwariskan secara naratif dalam ingatan kolektif masyarakat. Namun di sisi lain, kekalahan perang juga membuka ruang bagi penetrasi budaya asing. Sistem pendidikan, agama, serta gaya hidup kolonial mulai masuk melalui saluran-saluran resmi dan informal yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Akibatnya, nilai-nilai tradisional secara perlahan mengalami erosi dan digantikan oleh norma-norma baru yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kearifan lokal.

Lebih jauh, kondisi pascaperang juga ditandai oleh militerisasi wilayah Sunggal, yang ditandai dengan pembangunan pos-pos militer, patroli berkala, dan sistem pengawasan terhadap gerakan masyarakat. Situasi ini menciptakan atmosfer represi yang berkepanjangan dan menghambat pemulihan kehidupan sosial secara normal. Dalam jangka panjang, konsekuensi dari kondisi ini adalah terbentuknya masyarakat yang hidup dalam bayang-bayang trauma kolektif akibat kekerasan struktural yang diterapkan oleh rezim kolonial.

Salah satu bukti penting yang menunjukkan keberadaan dan signifikansi Perang Sunggal dalam arsip kolonial Belanda adalah sebuah dokumen berjudul “Sendikk Serah: Perranen Ssoenggal”, yang dikeluarkan oleh otoritas Keresidenan Sumatra's Westkust.



KERESIDENAN SUMATRA'S WESTKUST

SENDIKK SERAH.

PERRANEN SSOENGGAL.

PRaja Sunggal beberannggen sisap masah, diwysirun bernecai, dan melaka-bennya panjarah yang dilumung, menjarak nang dambah Sunggal telah disduntung rokong. Bingei mengunggal 27 September di di Bingei diskusi tajuaan untung seliak panjerai sa mas binggie. Malem Perpoelangan sama wd-punya ang'edepam anggie, dan sunanggie lebih lain beropa taning, tajug-god sama sago nnge. Berpeo pantu namen tunggol dengan! La benden wedung'na, mengen lolongga pastaraan, ai berdaai, dan tengah bertampung masyarakat menakaci setutuban as. Perpoelangan, keanda mak, rahuluhkan sehartat, dengan anggelok wai Perpoelangan.

Gambar 4.4 Dokumen Sendikk Serah, narasi kolonial tentang Perang Sunggal.
Sumber: Yayasan Soeltan Ma’moen Al-Rasyid

Dokumen ini ditulis dalam ejaan lama Bahasa Melayu dan menyebut secara eksplisit tentang tokoh Raja Sunggal, konflik di Bingei, serta dinamika sosial akibat perampasan tanah dan perlawanan masyarakat adat. Penggunaan bahasa lokal dan istilah seperti “berpoe pantun namen tunggol”atau “perpoelangan” merefleksikan bahwa kolonial Belanda tidak hanya melakukan kontrol fisik, tetapi juga mencoba merekam dan menginterpretasi gerakan rakyat melalui cara administratif dan naratif.

Secara tekstual, dokumen ini menegaskan dua hal yaitu Pengakuan kolonial terhadap eksistensi perlawanan Sunggal yang berulang dan meluas.Ketegangan diskursif antara narasi penjajah dan kenyataan sosial masyarakat adat, di mana rakyat tidak hanya dicatat sebagai objek administrasi, tetapi juga sebagai aktor sejarah.

Dalam konteks teori simbolik James C. Scott, dokumen ini adalah bentuk arsip hegemoniyakni cara kekuasaan kolonial mengontrol memori dan narasi. Namun bagi masyarakat Sunggal, keberadaan dokumen ini justru menjadi artefak penting dalam menegaskan identitas perlawanan dan legitimasi sejarah lokal yang bertahan secara lisan maupun dokumenter.

Perang Sunggal (1872–1895) merupakan manifestasi dari perlawanan masyarakat lokal terhadap struktur dominasi kolonial yang berupaya mereduksi otonomi politik dan budaya komunitas adat. Dalam konteks teoritik, perang ini dapat dianalisis melalui dua kerangka utama: pertama, teori resistensi terhadap kolonialisme yang menjelaskan bagaimana kekuatan lokal menentang penetrasi kekuasaan asing secara struktural maupun kultural (Scott, 1985); dan kedua, teori identitas budaya, yang menempatkan konflik ini sebagai titik artikulasi dalam pembentukan dan transformasi identitas kolektif masyarakat Sunggal (Hall, 1990).

Dari perspektif resistensi kolonial, Perang Sunggal mencerminkan bentuk perlawanan akar rumput (grassroots resistance) yang tidak semata-mata bersifat militeristik, melainkan juga ideologis dan terstruktur dalam sistem nilai adat. Ketika konsesi tanah adat diberikan secara sepihak kepada perusahaan-perusahaan tembakau oleh Kesultanan Deli atas dukungan Belanda, masyarakat Sunggal memandang hal tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tatanan sosial tradisional yang telah lama mereka pertahankan. Resistensi ini, sebagaimana dikemukakan oleh James C. Scott, bukanlah sekadar tindakan spontan, tetapi merupakan "senyap yang terorganisir" dari masyarakat subaltern terhadap bentuk hegemoni eksternal yang mengancam ruang hidup mereka.

Sementara itu, dari perspektif identitas budaya, Perang Sunggal menjadi momen penting dalam pembentukan narasi kolektif masyarakat Karo, khususnya kelompok marga Surbakti yang menjadi pusat kekuatan kerajaan. Perlawanan terhadap kolonialisme tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga menjadi upaya simbolik dalam menjaga keutuhan identitas budaya yang berbasis pada struktur adat, kekerabatan, dan relasi sosial tradisional seperti konsep urung, marga, dan ulon janji. Anthony D. Smith (1991) menyebutkan bahwa konflik dan tekanan eksternal sering kali berperan sebagai pemicu munculnya kembali kesadaran etnis dan identitas kultural, yang kemudian diartikulasikan dalam bentuk narasi perlawanan.

B. Pembentukan Identitas Sosial Masyarakat Pasca Perang Sunggal

Perang Sunggal (1872–1895) bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan juga menjadi titik balik penting dalam pembentukan identitas sosial masyarakat Sunggal. Konflik ini mempertemukan kekuatan lokalyang berbasis pada sistem adat, kekerabatan, dan kedaulatan genealogisdengan penetrasi kolonialisme modern yang membawa tatanan kekuasaan baru, sistem ekonomi kapitalistik, serta nilai-nilai sosial Barat. Dalam konteks ini, identitas sosial masyarakat Sunggal tidak hanya mengalami disrupsi, tetapi juga mengalami pembentukan ulang melalui pengalaman kolektif, resistensi, dan adaptasi pascakonflik.

1. Dekonstruksi Struktur Sosial Adat

Pasca berakhirnya Perang Sunggal (1872–1895), masyarakat Sunggal menghadapi disintegrasi mendalam pada struktur sosial tradisional yang selama berabad-abad menjadi fondasi tatanan hidup mereka. Salah satu perubahan paling signifikan adalah hilangnya kepemimpinan adat yang otoritatif dan legitimatif dalam struktur sosial masyarakat lokal. Penangkapan dan pengasingan tokoh-tokoh penting seperti Datuk Badiuzzaman Surbakti dan Datuk Alang Muhammad Bahar Surbakti bukan hanya merupakan tindakan represif militer oleh pemerintah kolonial, tetapi juga simbol dari keruntuhan kedaulatan lokal dan dekonstruksi atas pranata sosial berbasis adat(Eka Damayanti Hasibuan et al., 2024).

Dalam masyarakat Sunggal yang mayoritas beretnis Karo, struktur sosial tradisional dibangun di atas relasi genealogis yang kuat. Sistem marga, relasi KalimbubuAnak Beru, dan mekanisme adat musyawarah menjadi penopang kohesi sosial dan identitas komunal. Tokoh adat bukan hanya sebagai pemimpin politik, melainkan juga sebagai penjaga nilai, penengah konflik, dan perwakilan sakral dalam sistem kepercayaan lokal. Ketika tokoh-tokoh tersebut ditangkap, diasingkan ke Jawa (seperti ke Banyumas dan Cianjur), dan sistem kekuasaan adat dilumpuhkan, masyarakat mengalami disorientasi sosial yang dalam(Suprayitno & Hanum Ritonga, 2018).

Disorientasi ini diperparah oleh masuknya sistem kekuasaan kolonial yang menggantikan struktur adat dengan struktur birokrasi modern yang berfungsi atas dasar kepentingan kontrol administratif dan ekonomi kolonial. Dalam sistem ini, kekuasaan tidak lagi berdasarkan pada legitimasi genealogis dan konsensus adat, melainkan pada pengangkatan administratif yang ditentukan oleh otoritas kolonial dan sekutunya, seperti Kesultanan Deli, yang telah berkompromi dengan kekuatan Belanda dalam proyek ekspansi agraria (konsesi tembakau)(Sinar, 1970).

Proses ini mengakibatkan transformasi mendalam dalam pembentukan identitas sosial. Identitas masyarakat Sunggal yang sebelumnya dikonstruksi melalui kategori adat seperti marga, garis keturunan, dan relasi kekerabatan mulai digantikan oleh kategori sosial kolonial yang bersifat produktif

dan administratif. Kategori-kategori seperti: “Buruh kontrak”, yakni individu yang bekerja dalam sistem kerja paksa di perkebunan tembakau milik perusahaan kolonial seperti Deli Maatschappij; “Penduduk konsesi”, yaitu masyarakat yang tinggal dan hidup di atas tanah yang telah dikonsesikan kepada perusahaan asing; “Anak sekolah Belanda”, sebagai generasi yang mulai diasimilasi ke dalam sistem pendidikan kolonial yang menanamkan nilai-nilai Barat dan menjauhkan dari nilai-nilai adat;adalah cerminan dari dekonstruksi identitas tradisional menuju identitas yang ditentukan oleh sistem kolonial dan relasi produksi kapitalistik. Kategori-kategori ini bukan hanya label administratif, tetapi juga representasi struktur kekuasaan baru yang membentuk bagaimana individu melihat dirinya dan diposisikan dalam tatanan sosial pasca perang.

Lebih jauh, dekonstruksi ini memunculkan konflik identitas internal dalam masyarakat. Generasi muda yang mulai mengenyam pendidikan kolonial mengalami keterputusan dengan tradisi dan nilai-nilai adat, sementara generasi tua tetap mempertahankan sistem lama yang telah kehilangan fungsi politis dan sosialnya. Dalam kerangka teori Stuart Hall, hal ini menunjukkan bahwa identitas tidak bersifat tetap, melainkan terbentuk dan dibentuk ulang secara historis dan diskursif. Identitas masyarakat Sunggal pascaperang adalah hasil dari negosiasi antara memori historis atas struktur adat yang hilang dan kenyataan hidup dalam tatanan kolonial yang hegemonik.

Dalam jangka panjang, proses dekonstruksi ini tidak hanya melumpuhkan pranata adat, tetapi juga menciptakan fondasi bagi terbentuknya identitas sosial baru yang bersifat ganda dan kompleks: masyarakat menjadi subjek dalam struktur kolonial, namun tetap membawa ingatan kolektif tentang otonomi adat yang pernah ada. Dalam banyak kasus, kondisi ini menumbuhkan kesadaran subaltern, yaitu perasaan kehilangan namun juga resistensi diam terhadap hegemoni kolonial, yang diwujudkan dalam bentuk narasi lisan, praktik budaya tersembunyi, hingga penghormatan diam-diam kepada leluhur yang pernah melawan penjajahan.

2. Konsolidasi Nilai dan Solidaritas Komunal

Meskipun struktur kekuasaan adat mengalami dekonstruksi pascaperang, masyarakat Sunggal tidak sepenuhnya kehilangan arah. Justru dalam situasi krisis sosial tersebut, terjadi konsolidasi nilai-nilai komunal dan penguatan solidaritas internal sebagai bentuk adaptasi dan resistensi terhadap sistem kolonial. Proses ini memperlihatkan bahwa kehancuran struktur tidak selalu identik dengan kehancuran nilai; sebaliknya, nilai-nilai adat yang terdesak justru mengalami revitalisasi dalam konteks yang baru(Munthe, 2012).

Solidaritas komunal pascaperang muncul dalam berbagai bentuk. Di satu sisi, masyarakat memperkuat jaringan kekerabatan dan solidaritas lintas marga sebagai respons terhadap pemaksaan struktur kolonial. Institusi adat seperti Runggun (musyawarah adat Karo), Kerabat Anak Beru-Kalimbubu, serta forum informal antar kampung mengalami penguatan fungsional meskipun tidak diakui oleh sistem administrasi resmi kolonial. Dalam kerangka ini, solidaritas bukan hanya bentuk pertahanan sosial, tetapi juga pembentukan identitas baru yang berakar pada pengalaman kolektif tentang kehilangan dan perjuangan.

Fenomena ini dapat dipahami melalui teori identitas sosial dari Henri Tajfel, yang menyatakan bahwa kelompok sosial cenderung membentuk identitas kolektif yang lebih kuat ketika menghadapi ancaman eksternal. Perang Sunggal dan represi kolonial menciptakan "ingroup solidarity"di mana masyarakat yang sebelumnya memiliki dinamika internal yang cair, mulai menyatukan diri dalam satu entitas kultural melawan dominasi luar. Identitas “masyarakat Sunggal” pascaperang menjadi lebih kohesif secara simbolik, bahkan jika secara politik telah mengalami subordinasi.

Sebagai contoh, dalam kisah-kisah lisan yang berkembang di tengah masyarakat, para tokoh adat yang tertindas tidak hanya dikenang sebagai korban kolonialisme, tetapi juga sebagai lambang keteguhan, kehormatan, dan keadilan. Kisah Datuk Badiuzzaman yang tetap menolak tunduk meski ditawan, atau kisah perjuangan pemuda-pemuda Sunggal yang menghindari kerja paksa dan memilih berpindah ke pedalaman, menjadi narasi pemersatu yang mempertegas nilai-nilai keberanian, harga diri, dan solidaritas.

Selain itu, bentuk-bentuk baru solidaritas juga terbentuk dari interaksi lintas etnis yang terbangun selama masa perang. Aliansi antara etnis Karo, Gayo, Melayu, dan Aceh dalam menghadapi Belanda telah menanamkan benih solidaritas lintas kultural yang meskipun tidak permanen, namun menjadi memori kolektif yang memperluas horizon identitas masyarakat lokal. Solidaritas ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap penjajahan tidak sekadar bersifat etnosentris, tetapi bersifat inklusif berdasarkan pengalaman bersama dalam mempertahankan hak atas tanah dan martabat(Damanik, 2019).

Proses ini memperlihatkan bagaimana identitas komunal pascaperang tidak sekadar didasarkan pada warisan adat, tetapi juga pada pengalaman bersama atas penderitaan dan perjuangan. Identitas ini bersifat dinamis, dibentuk melalui relasi sejarah yang traumatik namun juga menyatukan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Manuel Castells dalam gagasannya tentang resistance identity, identitas yang terbentuk dalam konteks represi seringkali bersifat defensif namun dapat menjadi sumber kekuatan simbolik yang signifikan. Dalam hal ini, masyarakat Sunggal tidak hanya bertahan dalam sistem kolonial, tetapi juga memelihara semangat kolektif yang menjadi dasar kontinuitas sosial-budaya mereka hingga generasi berikutnya.

3. Memori Kolektif dan Artikulasi Identitas Lokal

Salah satu aspek paling penting dalam pembentukan identitas sosial masyarakat pascaperang adalah hadirnya memori kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun Perang Sunggal tidak banyak tercatat dalam sejarah nasional Indonesia, masyarakat lokal tetap menjaga kisah-kisah perjuangan ini melalui narasi lisan, tradisi, dan simbol budaya yang terus hidup dalam ingatan kolektif komunitas.

Dalam tradisi masyarakat Sunggal, tokoh-tokoh perlawanan seperti Datuk Badiuzzaman tidak hanya dikenang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol moral dan kultural. Praktik seperti ziarah ke makam para pejuang yang diasingkan, pengisahan kisah perlawanan dalam forum adat, serta penyebutan nama-nama pahlawan lokal dalam doa dan ritual adalah bentuk dari praktik ingatan kolektif yang memperkuat identitas sosial(Tarigan, 2012).

Memori ini tidak bersifat netral, melainkan politis dan simbolik. Sebagaimana dijelaskan oleh Stuart Hall, identitas budaya selalu dibentuk dalam medan representasi dan wacana, yang dipengaruhi oleh siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan apa yang layak dikenang dan apa yang diabaikan. Dalam hal ini, masyarakat Sunggal secara sadar mempertahankan narasi tandingan terhadap sejarah kolonial dan nasional yang cenderung meminggirkan peran mereka dalam perjuangan anti-kolonial.
Artikulasi identitas lokal juga dapat dilihat dalam penggunaan simbol-simbol adat dan kerajaan yang tetap dipertahankan. Bendera kerajaan Sunggal yang bergambar gajah, penggunaan istilah “musuh berngin” untuk menyebut tentara kolonial, serta penegasan status sebagai “masyarakat adat” adalah ekspresi kultural yang menandai kontinuitas identitas yang dibangun melalui pengalaman kolektif perlawanan(Surbakti, 2011).

Dalam konteks ini, resistensi budaya bukan hanya berupa perlawanan fisik, tetapi juga berlangsung dalam bentuk simbolik dan naratif. Identitas sosial masyarakat Sunggal tidak hanya dibentuk oleh trauma sejarah, tetapi juga oleh kebanggaan atas masa lalu yang heroik. Identitas ini hidup dalam narasi, dalam simbol, dan dalam praktik keseharian masyarakat.

Warisan memori ini menjadi sumber kekuatan kolektif yang penting, terutama dalam mempertahankan kesadaran sejarah di tengah arus modernisasi dan marginalisasi budaya lokal. Dengan demikian, memori kolektif pascaperang berfungsi sebagai pondasi ideologis bagi pembentukan identitas sosial yang tangguh dan berakar.

Jika disandingkan dengan teori James C. Scott tentang resistensi sehari-hari, maka praktik-praktik pewarisan ingatan ini dapat dilihat sebagai bentuk “perlawanan diam” terhadap dominasi wacana resmi. Dengan mempertahankan narasi lokal, masyarakat Sunggal menunjukkan agensinya dalam menentukan siapa diri mereka dan bagaimana mereka ingin dikenang oleh generasi mendatang.

4. Transformasi Sosial dan Perubahan Peran Adat

Dampak jangka panjang Perang Sunggal juga terlihat dalam transformasi struktur sosial dan perubahan peran institusi adat di tengah dominasi sistem kolonial. Jika sebelum perang masyarakat Sunggal sangat bergantung pada struktur genealogis dan otoritas adat dalam mengatur kehidupan sosial, maka pascaperang, struktur tersebut harus beradaptasi dengan realitas baru yang ditandai oleh dominasi ekonomi kapitalistik dan birokrasi kolonial(Aditya et al., 2024).

Transformasi ini tidak hanya mencakup aspek kepemimpinan, tetapi juga merambah pada perubahan nilai, etika kerja, dan pola hubungan antarindividu dalam masyarakat. Peran adat yang sebelumnya menjadi pusat pengambilan keputusan mulai tergantikan oleh struktur formal kolonial seperti kepala kampung yang diangkat oleh pemerintah, sistem administrasi Deli, dan pengaruh langsung dari perusahaan perkebunan. Tokoh-tokoh adat yang masih bertahan harus menyesuaikan perannya, dari yang semula otonom dan berkuasa secara penuh atas wilayah adat, menjadi lebih simbolik atau bahkan hanya bersifat seremonial.

Dalam kondisi ini, muncul semacam ambivalensi antara keberlanjutan adat dan penerimaan terhadap sistem baru. Masyarakat menghadapi dilema antara mempertahankan identitas tradisional atau

menyesuaikan diri dengan sistem kolonial yang menjanjikan stabilitas, pekerjaan, dan akses pada pendidikan. Proses ini memunculkan dinamika identitas ganda dalam masyarakat: satu sisi berakar pada nilai-nilai adat, sisi lain mulai membentuk cara hidup baru yang selaras dengan sistem kolonial(Kresnoadi, 2022).

Transformasi ini juga berdampak pada stratifikasi sosial. Muncul kelompok elite baru yang memiliki akses terhadap pendidikan kolonial dan ekonomi perkebunan, yang posisinya tidak ditentukan oleh garis keturunan tetapi oleh kedekatan dengan sistem kolonial. Perubahan ini menggeser basis kekuasaan dari asal-usul adat ke basis administratif dan ekonomi, yang dalam jangka panjang menghasilkan ketimpangan baru dalam masyarakat.

Namun demikian, dalam kondisi keterdesakan tersebut, masyarakat adat Sunggal tidak sepenuhnya kehilangan jati dirinya. Mereka tetap mempertahankan ruang-ruang sosial budaya yang bersifat otonom, seperti ritual adat, musyawarah marga, dan perayaan-perayaan kultural yang diwariskan secara lisan. Dengan demikian, meskipun peran adat mengalami transformasi, ia tetap menjadi fondasi kultural yang mengikat komunitas secara simbolik dan historis.

Transformasi peran adat ini menunjukkan bahwa identitas sosial masyarakat Sunggal pascaperang terbentuk dalam medan tarik-menarik antara kekuatan hegemonik kolonial dan upaya lokal untuk mempertahankan nilai-nilai komunal. Dalam konteks ini, sebagaimana ditegaskan oleh Stuart Hall, identitas bukanlah esensi yang tetap, melainkan proses yang terus dibentuk melalui pengalaman historis, negosiasi sosial, dan praktik budaya sehari-hari.

5. Identitas dalam Dialektika Sejarah dan Kekuasaan

Pembentukan identitas sosial masyarakat Sunggal pasca Perang Sunggal mencerminkan suatu proses dialektika antara keruntuhan struktur adat dan tekanan kolonial dengan kemampuan masyarakat untuk mereproduksi makna sosial dan solidaritas kolektif. Identitas yang terbentuk bukanlah sesuatu yang utuh dan tunggal, melainkan hasil dari perjumpaan antara kekuatan eksternal (kolonialisme dan kapitalisme agraria) dan respons internal (resistensi, memori kolektif, serta adaptasi nilai-nilai lokal)(Aditya et al., 2024).

Dalam dinamika ini, masyarakat Sunggal tidak hanya menjadi korban dari perubahan struktural, tetapi juga aktor aktif yang mengartikulasikan ulang siapa diri mereka, melalui simbol, narasi, dan praktik sosial. Perubahan struktur kekuasaan tidak serta merta menghapus nilai-nilai adat, melainkan memaksa masyarakat untuk memformulasikan ulang identitas dalam kondisi dominasi. Praktik-praktik budaya, penghormatan terhadap leluhur, serta narasi kepahlawanan lokal menjadi cara-cara untuk mempertahankan eksistensi di tengah desakan asimilasi.

Sebagaimana ditunjukkan oleh teori Stuart Hall, James C. Scott, Henri Tajfel, dan Manuel Castells, Identitas sosial bukanlah bentuk yang tetap, tetapi merupakan hasil dari proses sejarah yang kompleks, penuh negosiasi dan resistensi. Dalam hal ini, Perang Sunggal menjadi ruang historis yang memproduksi identitas masyarakat Sunggal melalui trauma, perjuangan, serta keberlanjutan nilai-nilai komunitas.

Proses pembentukan identitas sosial masyarakat Sunggal pasca Perang Sunggal merupakan hasil dari pertemuan antara kehancuran sistem adat dengan munculnya praktik resistensi simbolik dan solidaritas baru yang berakar pada pengalaman kolektif akan kolonialisme. Identitas sosial ini bukan hanya bersifat defensif, tetapi juga produktif dalam membentuk sistem nilai, ingatan sejarah, dan simbol-simbol lokal yang terus diwariskan. Dalam konteks inilah, Sunggal menjelma menjadi komunitas yang identitasnya tidak sekadar dibentuk oleh sejarah, tetapi juga membentuk sejarah itu sendiri.Dengan demikian, identitas sosial masyarakat Sunggal pascaperang adalah identitas yang terbentuk di antara keterputusan dan kontinuitas, di antara keterjajahan dan perlawanan, serta di antara kehancuran struktur dan penciptaan makna baru. Identitas ini tetap hidup dalam ingatan, budaya, dan semangat masyarakat Sunggal hari ini.

Pembentukan identitas sosial masyarakat Sunggal pasca Perang Sunggal tidak berlangsung secara linier atau statis, melainkan melalui suatu proses dialektika yang kompleks antara kekuatan eksternal dan dinamika internal komunitas. Dalam hal ini, kekuasaan kolonial dan sistem kapitalisme agraria yang masuk melalui konsesi tembakau menjadi pemicu utama keruntuhan struktur adat dan sistem politik tradisional di wilayah Sunggal. Namun, keruntuhan tersebut tidak serta-merta menghapus identitas kolektif masyarakat. Sebaliknya, masyarakat Sunggal menampilkan kapasitas untuk melakukan reformulasi makna sosial dan reproduksi identitas kolektif berdasarkan pengalaman sejarah yang mereka alami.

Identitas sosial yang terbentuk bukanlah entitas tunggal, melainkan hasil dari perjumpaan antara dominasi struktural kolonial dan resistensi kultural lokal. Dalam pertemuan ini, masyarakat Sunggal tidak hanya bertindak sebagai objek yang dijajah, tetapi sebagai subjek yang secara aktif membangun ulang kesadaran diri mereka melalui simbol, narasi, dan praktik budaya. Misalnya, penghormatan terhadap leluhur pejuang seperti Datuk Badiuzzaman, pelestarian narasi Perang Sunggal, dan penggunaan simbol-simbol lokal (bendera kerajaan, terombo, masjid Kedatukan) adalah bentuk konkret dari upaya mempertahankan eksistensi identitas dalam situasi keterjajahan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Stuart Hall, identitas budaya selalu terbentuk dalam momen krisis, melalui praktik representasi, pemaknaan, dan pemilihan posisi. Hal ini terlihat dalam cara masyarakat Sunggal memaknai kembali sejarah mereka pascaperang, bukan sebagai masa lalu yang telah hilang, melainkan sebagai ruang diskursif tempat mereka membangun narasi diri. Sementara itu, James C. Scott menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap dominasi kekuasaan kerap dilakukan secara simbolik dan tersembunyi. Dalam konteks Sunggal, praktik-praktik budaya dan penghormatan terhadap tokoh adat menjadi bentuk hidden transcript yang secara diam-diam menegaskan eksistensi identitas lokal.

Lebih jauh, teori Henri Tajfel mengenai identitas sosial menunjukkan bahwa identitas kelompok terbentuk melalui proses kategorisasi sosial dan pembentukan ingroup. Dalam situasi kolonial, masyarakat Sunggal justru mempertegas batas identitas mereka sebagai bagian dari komunitas adat yang ditindas, tetapi tetap bertahan melalui solidaritas, bahasa, dan struktur sosial internal. Identitas mereka terbentuk dalam posisi yang terus-menerus dinegosiasikan antara kehilangan dan keberlanjutan. Sementara itu, Manuel Castells menyoroti bahwa dalam era dominasi sistemik, kelompok-kelompok yang terpinggirkan akan membentuk apa yang disebutnya sebagai identitas perlawananyakni identitas yang lahir dari kebutuhan untuk menentang tatanan yang menindas. Masyarakat Sunggal membentuk identitas ini melalui semangat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, mempertahankan sistem adat dan nilai-nilai lokal meski struktur kekuasaan telah berubah drastis.

Dalam konteks Perang Sunggal, peristiwa ini tidak hanya menjadi catatan perlawanan militer, tetapi juga menjadi ruang historis yang memproduksi dan mereproduksi identitas masyarakat melalui trauma kolektif, kenangan perjuangan, dan kesinambungan nilai komunitas. Maka, identitas sosial masyarakat Sunggal pascaperang dapat dipahami sebagai identitas yang terbentuk di tengah keterputusan dan kontinuitas, antara dominasi dan resistensi, serta antara kehancuran struktur lama dan penciptaan makna baru.

Dengan demikian, identitas masyarakat Sunggal bukan hanya hasil dari sejarah, tetapi juga menjadi agen yang membentuk sejarah itu sendiri. Identitas tersebut tetap hidup dan berdenyut dalam budaya, ingatan kolektif, serta semangat komunitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia bukan hanya milik masa lalu, tetapi menjadi dasar bagi arah masa depan komunitas Sunggal dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan kultural masa kini.

C. Warisan Budaya dan Kontinuitas Memori Perang Sunggal

Selain membentuk identitas sosial, Perang Sunggal juga mewariskan jejak budaya dan memori kolektif yang terus hidup dalam praktik sosial masyarakat. Warisan ini bukan sekadar tinggalan masa lalu, tetapi menjadi modal simbolik dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai adat dan memperkuat kesadaran sejarah.

Praktik seperti ziarah ke makam tokoh-tokoh perlawanan, penuturan cerita kepahlawanan secara lisan, serta pengorganisasian acara adat yang mengenang masa perjuangan menjadi bentuk nyata dari pelestarian memori historis. Memori ini tidak hanya dijaga oleh keturunan langsung para tokoh perang, tetapi juga oleh masyarakat secara umum melalui sistem pewarisan budaya dalam keluarga dan komunitas adat.

Narasi tentang Perang Sunggal juga menjadi bagian dari identitas kultural yang dibangun untuk menegaskan posisi masyarakat Sunggal dalam sejarah lokal. Ketika sejarah nasional cenderung mengabaikan peristiwa-peristiwa lokal seperti Perang Sunggal, maka memori kolektif ini berfungsi sebagai strategi perlawanan terhadap penghapusan sejarah dan pengingkaran terhadap kontribusi lokal dalam perjuangan anti-kolonial.

Dalam konteks ini, warisan budaya dari Perang Sunggal bukan hanya mengenai artefak fisik atau peninggalan simbolik, tetapi lebih dalam lagi menyangkut reproduksi nilai-nilai seperti keberanian, harga diri, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Warisan ini juga dapat dipahami sebagai "cultural capital" yang memperkuat posisi masyarakat Sunggal dalam menghadapi tantangan modernitas dan arus globalisasi.

Dengan demikian, kontinuitas memori dan warisan budaya dari Perang Sunggal menjadi salah satu fondasi penting dalam mempertahankan identitas masyarakat secara kultural, historis, dan ideologis. Ia bukan sekadar bagian dari masa lalu, tetapi menjadi referensi dalam menentukan sikap dan orientasi masa depan masyarakat Sunggal.

Hal ini menunjukkan bahwa Perang Sunggal tidak hanya berdampak secara politik dan militer, tetapi juga menjadi peristiwa yang secara signifikan membentuk dan mengarahkan identitas sosial masyarakat Sunggal. Identitas tersebut terbentuk melalui proses yang kompleks, melibatkan keruntuhan struktur sosial adat, kemunculan solidaritas lintas etnis, praktik resistensi simbolik, serta pelestarian memori kolektif.

Masyarakat Sunggal pascaperang menyesuaikan diri dengan realitas kolonialisme tanpa kehilangan akar budaya dan nilai-nilai komunalnya. Proses pembentukan identitas ini ditandai oleh keberlanjutan struktur adat secara simbolik, munculnya pola identitas baru berbasis pengalaman kolektif atas penderitaan dan perlawanan, serta pewarisan nilai-nilai historis yang membentuk sikap dan pandangan hidup komunitas.

Warisan budaya dan memori perang berperan sebagai instrumen penting dalam mempertahankan eksistensi identitas masyarakat Sunggal. Di tengah marginalisasi sejarah lokal oleh narasi nasional yang dominan, masyarakat tetap memelihara sejarahnya sendiri, menjadikannya sumber kekuatan sosial dan kultural.

Berdasarkan kerangka teori budaya dan perubahan sosial (Kingsley Davis), identitas budaya (Stuart Hall), serta resistensi simbolik (James C. Scott), dapat dianalisis bahwa proses pascaperang telah memicu munculnya pola-pola budaya baru, sekaligus mempertahankan unsur-unsur kultural lama dalam format yang lebih reflektif dan strategis. Terdapat lima aspek utama transformasi budaya masyarakat Sunggal pasca Perang Sunggal:

1. Pelestarian Tradisi dan Revitalisasi Adat sebagai Resistensi Budaya

Perang Sunggal memicu semangat pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai bentuk simbolik perlawanan terhadap dominasi kolonial Belanda dan kooptasi Kesultanan Deli. Dalam kondisi represi dan kekalahan, masyarakat justru menguatkan kembali praktik-praktik adat seperti upacara adat, pelestarian sistem marga, serta penggunaan simbol-simbol lokal seperti cap kerajaan dan bendera berlambang gajah yang telah diresmikan sejak masa Datuk Amar Laut Surbakti. Praktik-praktik tersebut menjadi instrumen simbolik dalam memperkuat memori kolektif dan identitas kultural yang merefleksikan resistensi terhadap upaya delegitimasi identitas lokal(Munthe, 2012).

2. Adaptasi Budaya terhadap Modernitas Kolonial

Meskipun masyarakat Sunggal mempertahankan identitas budayanya, tidak berarti mereka menutup diri sepenuhnya terhadap perubahan. Pascaperang, masyarakat mulai melakukan adaptasi terhadap unsur-unsur modernitas kolonial secara selektif dan pragmatis. Dalam bidang pendidikan, misalnya, beberapa kalangan menerima sistem pendidikan kolonial Belanda sebagai sarana mobilitas sosial, namun tetap menyisipkan nilai-nilai lokal dalam proses sosialisasi anak, seperti penghormatan terhadap orang tua dan tokoh adat.

Usai perang, struktur formal Kerajaan Sunggal memang mengalami keruntuhan, namun warisan identitas politik dan kultural dari kerajaan tersebut tidak pernah benar-benar lenyap. Justru, nama “Sunggal” terus dipertahankan oleh masyarakat sebagai bentuk ingatan kolektif terhadap kejayaan dan semangat perlawanan leluhur mereka. Dalam hal ini, memori sejarah bukan sekadar romantisasi masa lalu, tetapi menjadi elemen pembentuk identitas lokal yang hidup hingga saat ini.

Seiring dengan perkembangan wilayah administratif, pada tahun 1973 terjadi perluasan wilayah Kotamadya Medan, di mana sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang, termasuk kawasan Sunggal, diintegrasikan ke dalam Kota Medan. Proses ini menandai pergeseran dari sistem kekuasaan tradisional ke dalam sistem pemerintahan modern yang berbasis administratif. Meski begitu, nilai-nilai historis dan kultural yang melekat dalam masyarakat tetap bertahan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri masyarakat Kelurahan Sunggal.

Hingga saat ini, Kelurahan Sunggal telah mengalami kepemimpinan dari 12 lurah, menandakan kontinuitas administrasi yang berjalan dalam kerangka negara modern. Namun demikian, jejak-jejak sejarah kerajaan, seperti nama wilayah, situs budaya, masjid tua, dan makam tokoh adat, masih tetap dijaga sebagai bukti historis bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat penting perlawanan lokal terhadap kolonialisme.

Lebih dari itu, kemampuan masyarakat Sunggal dalam merawat nilai-nilai lokal di tengah penetrasi sistem kolonial menunjukkan bahwa identitas budaya bukanlah entitas yang rapuh, tetapi

memiliki daya lenting yang tinggi. Dalam situasi pascaperang yang ditandai oleh disorientasi struktur kekuasaan dan tekanan sistemik kolonial, masyarakat mampu menemukan ruang untuk menegosiasikan nilai-nilai lama dengan tatanan baru yang hadir. Negosiasi ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan: mulai dari pendidikan, pengelolaan lahan, hingga pelestarian ruang simbolik seperti masjid, situs makam raja, dan struktur komunitas yang masih menggunakan sistem kekerabatan adat seperti kalimbubu–anak beru.

Fenomena adaptasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat Sunggal tidak serta-merta menjadi korban dari modernitas kolonial, tetapi justru menggunakan modernitas itu sendiri secara strategis untuk memperkuat eksistensi dan martabat budayanya. Dalam kerangka ini, identitas budaya Sunggal pascaperang tidak statis, tetapi produktif dan dinamis, mampu menjembatani masa lalu yang traumatis dengan masa depan yang penuh kemungkinan.

Jika kita menilik lebih jauh, proses ini sejatinya mencerminkan "agensi kultural" dari masyarakat Sunggalyakni kemampuan kolektif untuk menyusun ulang struktur sosial, menata ruang makna, dan menyematkan nilai-nilai lokal dalam tatanan modern. Identitas yang terbangun pascaperang bukan hanya bersifat defensif, melainkan juga afirmatif, di mana masyarakat secara sadar memilih untuk menghidupkan kembali simbol-simbol lokal sebagai bentuk keberlanjutan sejarah dan kebudayaan.

Oleh karena itu, proses adaptasi budaya masyarakat Sunggal terhadap modernitas kolonial telah menjadi bagian dari strategi bertahan dan artikulasi identitas lokal dalam menghadapi dominasi eksternal. Adaptasi ini tidak hanya terjadi di masa lampau, tetapi juga mewarnai dinamika masyarakat kontemporer, di mana nilai-nilai adat, religiusitas, dan memori sejarah tetap menjadi fondasi dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Sunggal hingga hari ini.

Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh James C. Scott sebagai bentuk infrapolitik atau strategi bertahan dari bawah. Dalam situasi keterbatasan, masyarakat mengadopsi nilai-nilai baru tanpa menanggalkan jati diri budayanya. Bahkan dalam pengelolaan lahan yang sudah dikelilingi oleh kebun-kebun tembakau kolonial, masyarakat tetap mempertahankan prinsip-prinsip pertanian adat dan penguasaan tanah ulayat.

3. Relasi Etnik dan Budaya Koeksistensial

Perang Sunggal tidak hanya memperkuat identitas internal masyarakat Sunggal, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam hubungan antar etnis. Perlawanan yang melibatkan suku Karo, Melayu, Gayo, dan Aceh menciptakan solidaritas lintas budaya yang kemudian terejawantah dalam bentuk interaksi sosial pascaperang. Pengalaman bersama dalam melawan kolonialisme menumbuhkan rasa persaudaraan dan penghargaan antar kelompok etnis, yang pada akhirnya memperkaya keragaman budaya lokal.

Budaya Sunggal pasca perang menunjukkan karakter hibriditas yang mencerminkan perpaduan nilai-nilai Melayu Islam, adat Karo, dan unsur Aceh-Gayo. Budaya menjadi ruang koeksistensi yang tidak lagi eksklusif terhadap satu etnis, tetapi justru mencerminkan pluralitas dan keterbukaan. Relasi antar etnis yang sebelumnya mungkin dibatasi oleh struktur adat menjadi lebih inklusif karena pengalaman bersama dalam konflik dan perjuangan.

4. Memori Budaya dan Pembentukan Warisan Simbolik

Perang Sunggal turut membentuk narasi budaya yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari memori kolektif masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Datuk Badiuzzaman dan Datuk Alang Muhammad Bahar Surbakti, meskipun diasingkan oleh kolonial, dikenang sebagai pahlawan lokal. Makam mereka yang berada di Cianjur dan Banyumas bahkan disebut oleh masyarakat sebagai "Makam Istana Deli" dan dijadikan tempat ziarah, mempertegas bahwa mereka tetap hidup dalam kesadaran budaya masyarakat Sunggal(Ummah, 2019).

Selain itu, penyebutan istilah "Serbanyaman" sebagai nama lain Sunggal, pembuatan terombo (silsilah adat), dan cerita-cerita rakyat tentang perjuangan menjadi bagian dari repertoar kultural yang tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi alat pendidikan sejarah informal bagi generasi berikutnya. Budaya dalam konteks ini tidak hanya bersifat ekspresif, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pelestarian sejarah dan nilai-nilai kolektif(Surbakti, 2011).

Kehadiran Masjid Raya Kedatukan Sunggal juga menegaskan bahwa budaya masyarakat Sunggal tidak stagnan, melainkan adaptif dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur budaya lokal. Ini selaras dengan temuan pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa, meskipun Perang Sunggal mengakibatkan disintegrasi struktur kekuasaan adat, masyarakat tidak kehilangan daya adaptifnya dalam membangun identitas baru yang lebih religius dan komunal.

Masjid yang dibangun oleh Raja Badiuzzaman pada tahun 1885 itu, dalam konteks sejarah, berdiri di tengah momentum akhir dari perjuangan bersenjata yang berlangsung lebih dari dua dekade. Dalam konteks tersebut, masjid bukan hanya dibayangkan sebagai pusat ibadah, melainkan sebagai pusat ideologi perlawanan, tempat strategi dipikirkan dan kesetiaan terhadap tanah air ditegaskan. Ia menjadi simbol bahwa perjuangan rakyat Sunggal bukan hanya bersifat militeristik, tetapi juga kultural dan spiritual.

Temuan ini juga memperkaya dimensi memori budaya yang dibahas dalam skripsi ini. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, masyarakat Sunggal membentuk identitas kolektif melalui narasi, simbol, dan tempat-tempat keramat seperti makam tokoh perlawanan dan bangunan peninggalan kerajaan. Masjid Badiuzzaman, dalam hal ini, menjadi penanda sejarah yang hidup, tempat memori sosial tentang kolonialisme, perjuangan, dan keteguhan dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Lebih jauh, fungsi masjid sebagai pusat berkumpulnya tokoh kerajaan dan rakyat pada masa perang menunjukkan bahwa spasialitas budaya (ruang-ruang yang digunakan dan dimaknai secara budaya) turut berperan dalam membentuk struktur sosial masyarakat pascaperang. Ruang ibadah menjadi ruang politik, dan ruang politik menjadi arena budaya. Hal ini memperkuat simpulan bahwa proses pembentukan identitas budaya masyarakat Sunggal tidak terlepas dari ruang simbolik yang mereka bangun, rawat, dan maknai bersama.



Gambar 4.4 : Masjid Badiuzzaman di Kecamatan Sunggal
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dengan memperhatikan keseluruhan dinamika sosial dan budaya pasca Perang Sunggal, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sunggal bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga membangun ulang identitas sosial dan budayanya melalui resistensi simbolik, pelestarian memori, serta adaptasi terhadap perubahan struktural. Mereka berhasil mempertahankan nilai-nilai dasar dari komunitas kerajaan ke dalam kerangka negara-bangsa modern, tanpa kehilangan jati diri.

Proses ini menunjukkan bahwa identitas sosial dan budaya masyarakat Sunggal merupakan hasil negosiasi terus-menerus antara sejarah, kuasa, dan makna. Dalam konteks ini, warisan Kerajaan Sunggal, memori perlawanan, serta keberadaan lembaga-lembaga budaya seperti masjid dan sistem adat telah membentuk fondasi identitas masyarakat yang tetap relevan hingga kini.

5. Perubahan Norma dan Nilai dalam Struktur Budaya

Konsekuensi jangka panjang dari Perang Sunggal juga mencakup perubahan dalam struktur norma dan nilai masyarakat. Kepemimpinan yang sebelumnya bersifat aristokratis, perlahan tergantikan oleh model kepemimpinan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas. Tokoh agama, guru, dan pemuka masyarakat mulai mengambil peran strategis dalam membimbing arah moral dan budaya masyarakat. Hal ini mencerminkan pergeseran dari kekuasaan yang berbasis keturunan menuju otoritas yang berbasis legitimasi sosial dan kontribusi moral(Eka Damayanti Hasibuan et al., 2024).

Islam menjadi unsur budaya yang semakin dominan, bukan hanya dalam praktik ibadah, tetapi juga dalam penanaman nilai-nilai etis seperti kejujuran, gotong royong, dan kesetiaan. Namun, nilai-nilai tradisional seperti keberanian, kehormatan, dan solidaritas tetap dijaga sebagai etos budaya yang diwariskan dari masa perang. Ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat Sunggal bersifat dinamis dan interpretatif, disusun berdasarkan pengalaman sejarah dan kebutuhan sosial saat itu.

Budaya masyarakat Sunggal pasca Perang Sunggal merupakan hasil dialektika antara warisan adat, trauma kolonial, dan kebutuhan akan pembaruan sosial. Dalam konteks ini, budaya berfungsi sebagai instrumen pertahanan identitas, alat artikulasi perlawanan, serta wahana pembentukan

solidaritas komunal lintas generasi dan etnis. Meskipun mengalami tekanan dari kekuasaan kolonial dan dominasi modernitas, masyarakat Sunggal tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menghidupkan kembali unsur-unsur budaya lokal dalam konteks yang lebih reflektif, plural,dan strategis. Transformasi ini menunjukkan bahwa budaya adalah arena dinamis yang terus berproses dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan sejarah.

KESIMPULAN

Perang Sunggal (1872–1895) merupakan peristiwa penting yang tidak hanya merepresentasikan perlawanan militer terhadap kolonialisme Belanda, tetapi juga menjadi tonggak dalam pembentukan identitas sosial dan budaya masyarakat Sunggal. Perang ini muncul sebagai respons atas politik konsesi dan perampasan tanah adat oleh kekuatan kolonial yang didukung oleh elite lokal komprador dari Kesultanan Deli. Resistensi yang dipimpin oleh Badiuzzaman Surbakti bukan hanya mempertahankan teritori, tetapi juga mempertahankan martabat, sistem nilai, dan struktur sosial yang dibangun oleh masyarakat adat selama berabad-abad.

Dampak perang ini multidimensional. Secara politik, perang menyebabkan runtuhnya otonomi lokal dan institusi pemerintahan adat. Secara sosial, terjadi dislokasi komunitas, pergeseran struktur kekerabatan, dan kemunculan kategori sosial baru yang ditentukan oleh sistem kolonial. Di bidang ekonomi, masyarakat kehilangan kontrol atas sumber daya dan mengalami proses proletarisasi dalam sistem perkebunan kolonial. Dari sisi budaya, terjadi transformasi nilai dan peran adat, namun juga muncul konsolidasi solidaritas dan revitalisasi simbol-simbol identitas lokal.

Identitas sosial masyarakat Sunggal pascaperang terbentuk melalui dialektika antara kehancuran dan resistensi, antara dominasi kolonial dan memori kolektif. Meskipun struktur kekuasaan adat dilemahkan, masyarakat berhasil mempertahankan nilai-nilai inti melalui narasi lokal, praktik adat, dan simbol budaya.Dengan demikian, Perang Sunggal menjadi ruang historis tempat identitas sosial dikonstruksi ulang dalam konteks kolonialisme, kekuasaan, dan perjuangan komunitas lokal.

REFERENSI

A. Daliman. (2018). *Metode Penelitian Sejarah*. OMBAK(Anggota IKAPI). https://online.flipbuilder.com/unindrapustaka/pawj/

Aditya, F., Songkup Pratama, R., Siagian, S. Z., Daely, V. G., & Yunita, S. (2024). Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, *8*(2), 24402–24407.

Damanik, E. L. (2019). Gugung Dan Jehe: Pembelahan Etnik Karo Di Sumatra Utara. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, *3*(1), 1–32. https://doi.org/10.33652/handep.v3i1.46

Dyah Budiastuti & Agustinur Bandur. (2018). *Validitas dan Reabilitas penelitian*. Mitra Wacana Media. https://core.ac.uk/download/pdf/187726085.pdf

Eka Damayanti Hasibuan, Muhammad Basri, & Diana Siregar. (2024). Situasi Dan Kondisi Perlawanan Terhadap Penjajahan Belanda Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Student*, *1*(3), 325–329.

Fandy. (n.d.). *Pengertian Kolonialisme: Perkembangan, Kedatangan dan Akibat*. https://www.gramedia.com/literasi/kolonialisme/

Farid Mas Hadi. (2012). (4) Perjuangan Politik Datuk Badiuzzaman Surbakti Dalam Perang Sunggal | Gayo Politik - Academia.edu. *Journal Dinamika Politik* , *1*(2). https://www.academia.edu/3430252/Perjuangan_Politik_Datuk_Badiuzzaman_Surbakti_Dalam_Perang_Sunggal

Kresnoadi. (2022). *Dampak Imperialisme dan Kolonialisme terhadap Bangsa Indonesia*. https://www.ruangguru.com/blog/imperialisme-dan-kolonialisme

Kristian, I., & Subagyo, A. (2023). *metode penelitian kualitatif*.

Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*.

Laila. (n.d.). *Identitas Sosial: Pengertian, Fungsi, Struktur dan Contohnya!* https://www.gramedia.com/literasi/identitas-sosial/

Munthe, J. P. (2012). *PERANAN DATUK BADIUZZAMAN SURBAKTI DALAM PERANG SUNGGAL PADA TAHUN 1872-1895*. https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/17555/

Pujiriyani, D. W., & Puri, W. H. (2013). Penyelesaian Konflik Penguasaandan Pemilikan Tanahdi Atas Tanah Hak Pengelolaan(Studi di Kecamatan Sukarame,Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung). *Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan (Hasil Penelitian Strategis)*, 265–293.

Sembiring, J. (2018). Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat. In *STPN Press* (Vol. 1).

Sinar, T. L. (1970). Perang Sunggal. In *Sari Sedjarah Serdang* (p. 118).
Sinar, T. L. (1970). *PERANG SUNGGAL 1872-1895*.
Sinar, Tengku Lukman,"Perang Besar dalam Kampung Keci: Riwayat Perjuangan Rakyat Sunggal", Prisma, No. 8 (Jakarta: LP3ES, Agustus 1980), hlm. 11. 59
Sinar, Tengku Lukman. 1971. Sari Sejarah Serdang; Jilid II. Medan:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sinar, Tengku Lukman. 2009. Sejarah Medan Tempo Doeloe. Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. .
Suprayitno, S., & Hanum Ritonga, F. (2018). The Sunggal War 1872-1895: In Search of East Sumatera Local Wisdom. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, *1*(3), 126–136. https://doi.org/10.33258/birci.v1i3.36
Surbakti, khairil anwar. (2011). *Kerajaan Sunggal Sebanyaman*. https://datukkhairilanwarsurbakti.blogspot.com/
Syauqii, F., Yasmin, N., & Naldo, J. (2022). Kontestasi Politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur, 1800-1865. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, *2*(3), 90–96. https://doi.org/10.34007/warisan.v2i3.1042
Tarigan, A. (2012). *Mengenang Kembali Perang Sunggal (1872-1895)*. https://www.medanbagus.com/read/2012/12/28/3120/mengenang-kembali-perang-sunggal-(1872-1895)*
Ummah, M. S. (2019). Akar perang sunggal 1872-1895. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
Nasution, A. (2024). *Dibangundengan Putih Telur, Masjid KedatukanSunggalBerdiri Kokoh SelamaRatusanTahun*. Tribun-Medan.com. https://medan.tribunnews.com/2024/03/29/dibangun-dengan-putih-telur-masjid-kedatukan-sunggal-berdiri-kokoh-selama-ratusan-tahun
Ajisaka, Arya. 2008. Mengenal Pahlawan Indonesia, Jakarta : Kawan Pustaka.
Hadi, Farid Mas. "Perjuangan Politik Datuk Badiuzzaman Surbakti dalam Perang Sunggal" Jurnal Dinamika Politik Vol. 1 No. 02, (Medan : Universitas Sumatera Utara, Oktober 2012), hlm. 23.
Muhammad Said. 1990.Koeli Kontrak Tempo Doeloe Dengan Derita dan Kemarahannya, Cetakan ke II. Medan: PT. Harian Waspada. Pelzer, Karl J. 1985 Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947. Jakarta: Sinar Harapan
Putro,Brahma. 1979. Karo Dari Zaman ke Zaman;. Jilid 2. Ulih Saber: Medan.
Ratna, "Orang Karo di Kerajaan Deli". Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia. Jil. XIX No. 1 (Jakarta: LIPI, 1992).
Reid, Anthony. 1987. Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera. Jakarta: Sinar Harapan.